

Kolaborasi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

Febrianto Syam¹ & Novayanti Sophia Rukmana²

Universitas Islam Alauddin Makassar¹

Universitas Negeri Makassar²

e-mail: febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Masalah terkait kependudukan adalah masalah yang menjadi persoalan yang strategis di Indonesia. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol dengan baik seperti angka kelahiran dan kepadatan wilayah menjadi masalah yang sering sulit ditemukan mekanisme pemecahannya. Meskipun pemerintah telah melaksanakan program Keluarga berencana sebagai program utama yang telah lama untuk mengatasi masalah kependudukan namun sampai saat ini masalah kependudukan ini belum terselesaikan dengan baik. Beberapa hal yang menjadikan permasalahan tersebut sulit antara lain program dari keluarga berencana yang dijalankan berbeda-beda oleh masing-masing badan atau dinas. Perencanaan yang terpisah seperti di kota makassar menjadikan program keluarga berencana sulit untuk mencapai target utama yang diharapkan. Dalam penelitian ini juga dilakukan menggunakan studi literatur dimana metode ini menggambarkan pelaksanaan program keluarga berencana di kota makassar. Hasil dari penelitian ini menemukan adanya beberapa hal terkait pelaksanaan program keluarga berencana di kota makassar seperti Perencanaan, Pelaksanaan dan Penganggaran di masing-masing dinas yang berbeda serta tidak adanya kolaborasi di lingkup pemerintahan kota makassar khususnya yang terkait dengan program keluarga berencana.

Kata Kunci :

Kolaborasi, New Institutionalisme, Program Keluarga Berencana

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena faktor pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh kepada tingkat pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk di era ini

sulit dikontrol oleh Pemerintah Pusat, efeknya segala proses layanan publik serta pemenuhan kesejahteraan di tingkat pusat maupun daerah bermasalah, salah satu bentuknya misalnya tentang pembagian bantuan atau pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tidak terkontrolnya pertumbuhan penduduk beberapa tahun ini disebabkan oleh kondisi pandemi di mana dari

kurun Februari 2020 hingga Januari 2022 masyarakat mengalami perubahan aktivitas yang sebelumnya lebih banyak di luar rumah harus menghabiskan banyak waktu mereka di rumah karena kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹ Faktor kedua dari pertumbuhan penduduk yang di luar kendali disebabkan program Keluarga Berencana (KB) tidak begitu maksimal dalam pelaksanaannya serta akses terhadap kebutuhan alat kontrasepsi yang terbatas selama pandemi membuat angka kehamilan terus bertambah.

Kenaikan jumlah penduduk dari Kota Makassar tiap tahunnya menyebabkan tingkat kepadatan penduduk kota juga semakin bertambah. Tahun 2020 menunjukkan sekitar 1.538.207 jiwa yang bermukim di wilayah kota sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk bertambah menjadi 1.555.088 jiwa atau bertambah sekitar 13.000 penduduk.² Angka pertambahan penduduk yang mengalami kenaikan di Kota Makassar menyebabkan kecenderungan Program KB yang dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi baik secara parsial atau keseluruhan. Program KB sebagai salah satu program utama perlu dilaksanakan dengan melibatkan antar dinas dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan

Pembangunan Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adanya koordinasi yang tidak sinergi antar dinas di Pemerintah Kota Makassar menjadi kendala dalam pelaksanaan Program KB mencapai targetnya. Kecenderungan masing-masing dinas dalam menjalankan program yang berkaitan dengan Program KB menjadi tidak sinkron satu sama lain dalam proses, baik perencanaan maupun pelaksanaannya. Adanya ego antar dinas di Pemerintah Kota Makassar yang memiliki program yang hampir sama dalam upaya pelaksanaan Program KB namun dalam implementasinya masing-masing dinas melaksanakan program secara sendiri-sendiri. Tumpang tindihnya program antar dinas menyebabkan target dari program KB sulit dicapai.

Tulisan ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan Program KB di Kota Makassar dan kendala apa yang menjadi penghambat terjadinya kolaborasi antar dinas dalam pelaksanaan Program KB tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Andi Cudai Nur dan Risma Niswaty dalam penelitiannya yang berjudul *Kepedulian Masyarakat terhadap Keluarga Berencana Tahun 2021*. Andi dan Risma menjelaskan tentang kepedulian masyarakat dalam hal pelaksanaan dan keikutsertaan mereka dalam penggunaan alat kontrasepsi guna mendukung program pemerintah dalam mengelola masalah pertumbuhan penduduk. Adanya pemberdayaan kampung KB

¹Tuti Marjan Fuadi dan Irdalisa, "Covid 19: Antara Angka Kematian dan Angka Kelahiran," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, Vol. 1, No. 3 (2020), h. 199–211.

²BPS Sulawesi Selatan, "Jumlah Penduduk (Jiwa) 2020-2022" dalam <https://sulsel.bps.go.id/indi-cator/12/83/2/jumlah-penduduk.html> diakses 25 Mei 2022.

oleh pemerintah menjadi salah satu pendukung terlaksananya Program KB meski pada tataran hasil pengabdian yang dilakukan terdapat masalah seperti partisi-pasi pasangan usia subur dalam program tersebut.³

Elga Aldina dalam penelitiannya yang berjudul *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*. Penelitian ini menjelaskan angka kejadian kehamilan di luar nikah saat pandemi menyebabkan dispensasi persetujuan pernikahan dini pada anak.

Pelibatan seluruh elemen seperti regulasi terkait kebijakan pendidikan serta keikutsertaan semua stakeholder seperti DPR-RI dalam hal ini komisi VIII untuk melihat regulasi pernikahan menjadi hal penting guna mencegah semakin seringnya terjadi pernikahan anak yang disebabkan kehamilan di luar nikah.⁴

Fitri dalam penelitiannya berjudul *Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar*. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan Program KB yang secara teknis berdasarkan data penelitian yang dilakukan masyarakat

merasa puas akan informasi terkait program tersebut.⁵

Dalam beberapa penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya persamaan masing-masing penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah upaya pelaksanaan Program KB. Tiga penelitian di atas merujuk pada pelaksanaan program sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait kolaborasi pemerintah dalam upaya penyamaan program antar masing-masing dinas atau badan dalam upaya penyelesaian masalah program keluarga berencana.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Kolaborasi

Kolaborasi adalah salah satu kunci dalam pelaksanaan suatu perencanaan. Dengan berkolaborasi beberapa sumber daya mampu dimanfaatkan dalam upaya pencapaian target perencanaan yang dilakukan. Dalam Program KB, kolaborasi antar sektor perlu dilakukan mengingat permasalahan angka kelahiran penduduk bukan hanya milik lembaga atau dinas yang memiliki program tersebut, melainkan pelaksanaan Program KB harus dilakukan dengan kerjasama lintas sektor yang mendorong terciptanya kolaborasi. Kolaborasi antar sektor tersebut bisa didukung dengan upaya aktor seperti kepala dinas bahkan posisi politik seperti kepala daerah dalam upaya menyatukan kegiatan lintas sektor khusus dalam Program KB.

³Andi Cudai Nur & Risma Niswaty, "Kepedulian Masyarakat Terhadap Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Makassar", *Prosiding Edisi 2: Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2021* (2021), h. 124–131.

⁴Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", *INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 13, No. 4 (2021), h. 13–18.

⁵Fitri, "Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar", *Skripsi* (Samata: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Kolaborasi dalam pelaksanaan Program KB dapat diinisiasi oleh aktor-aktor dalam lembaga pemerintah Kota Makassar demi adanya sinergitas antar dinas. Kolaborasi ini menjadi pengamalan dari konsep organisasi di mana masing-masing bagian dalam satu sistem yang sama saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni tercapainya pelaksanaan Program KB dalam organisasi pemerintah Kota Makassar.

Jaringan Pemerintahan dalam Kebijakan Publik

Struktur dan proses pembuatan kebijakan publik dan sosial pemerintahan berubah dengan cepat. Banyak laporan tentang kegagalan pemerintah nasional dan lokal untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Riset jaringan tata kelola berakar wawasan sentral yang dikembangkan dalam teori organisasi dan teori politik.⁶ Konsepsi organisasi sebagai sistem terbuka yang beradaptasi perubahan lingkungan,⁷ dan pengakuan itu lingkungan ini terdiri dari organisasi lain yang membuka jalan bagi yang baru fokus pada pertukaran informasi dan sumber daya antar organisasi yang terjadi di dalam dan melalui bentuk-bentuk interorganisasi yang relatif stabil.⁸

⁶Walter J.M. Kickert, Erik-Hans Klijn & Joop F.M. Koppenjan, *Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector* (London: SAGE Publications Ltd, 1997).

⁷Henry Mintzberg, "An Emerging Strategy of 'Direct' Research", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24, No. 4 (1979), h. 582–589.

⁸David A. Whetten & Howard Aldrich, "Organization Setsize and Diversity: People-Processing Organizations and Their Environments", *Administration & Society*, Vol. 11, No. 3 (1979), h. 251–281.

Jaringan pemerintahan berkontribusi pada produksi kebijakan publik dan pemerintahan. Visi politik, ide-ide kebijakan, rencana komprehensif, norma-norma informal dan peraturan rinci sering dibuat, atau setidaknya dipengaruhi, melalui proses kebijakan yang melibatkan aktor yang relevan dan terpengaruh dari negara, pasar dan masyarakat sipil. Output kebijakan jaringan adalah hasil kontingen dari interaksi yang dinegosiasikan antara pluralitas aktor-aktor yang saling bergantung, dan secara operasional otonom. Bentuk dan karakter output kebijakan tergantung pada bentuk dan karakter dari interaksi horizontal antara aktor jaringan.

Pertukaran yang dinegosiasikan antara berbagai aktor berubah seiring waktu dan bervariasi dari jaringan tata kelola ke jaringan pemerintahan. Pada dasarnya, tata kelola berbasis jaringan adalah proses yang kompleks dan berpotensi kacau di mana banyak kepentingan, identitas dan rasionalitas bergabung dan bertabrakan. Namun, interaksi antara pelaku jaringan tidak terjadi dalam kekosongan, melainkan berjalan dalam kerangka yang dilembagakan secara relatif yang memfasilitasi dan menghambat interaksi politik dan dengan demikian mempengaruhi produksi output dan hasil dari jaringan tata kelola. Kerangka yang dilembagakan terdiri dari lebih kurang aturan, norma, paradigma kognitif, dan imajinasi sosial yang dibangun di dalam dan melalui interaksi yang dinegosiasikan. Kenyataan bahwa jaringan tata kelola distabilkan oleh pembentukan peraturan, norma, dan sebagainya yang bersifat sementara dan tentatif tidak meng-

ubah jaringan pemerintahan menjadi organisasi dalam arti aktor institusional yang relatif formal dan terpadu. Jaringan pemerintahan mungkin merekrut agen publik, mitra sosial, gerakan sosial dan bentuk organisasi politik lainnya, dan mereka bahkan mungkin bercita-cita untuk membentuk, atau menjadi, sebuah organisasi.

New Institutionalisme dalam Jaringan Pemerintahan

Jaringan tata kelola menyatukan berbagai aktor politik yang memiliki basis aturan dan sumber daya yang berbeda. Para pelaku jaringan terlibat dalam interaksi antar budaya yang ditandai oleh konflik, ambiguitas dan ketidakpastian. Pada awalnya, para aktor mungkin mencoba untuk membentuk suatu mode interaksi yang memfasilitasi kerja sama dan pengambilan keputusan bersama. Mereka bahkan mungkin mencoba menstabilkan cara interaksi ini melalui konstruksi aturan formal dan informal dan pengembangan norma, nilai dan konsepsi bersama. Namun, ini tidak mengubah jaringan pemerintahan menjadi institusi dalam pengertian sistem sosial yang terintegrasi dengan baik yang didasarkan pada aturan umum, norma dan mekanisme kepatuhan yang memungkinkan reproduksi pola interaksi sosial yang stabil dan peran serta identitas para pelaku.

Jaringan pemerintahan bukanlah organisasi atau lembaga dalam pengertian yang sempit, tetapi kerangka kerja negosiasi yang relatif dilembagakan di mana aktor-aktor yang berbeda saling bertikai, menciptakan peluang untuk keputusan

bersama, menjalin kompromi politik dan mengkoordinasikan tindakan. Konflik yang ditopang oleh perbedaan budaya, sosial dan politik antara aktor yang relatif otonom mencegah jaringan pemerintahan berubah menjadi lembaga politik yang stabil. Namun demikian, pelembagaan jaringan pemerintahan yang relatif, yang memfasilitasi dan membatasi interaksi yang dinegosiasikan, memungkinkan kami untuk menggunakan teori institusional untuk memahami dinamika jaringan tata kelola dengan mempertimbangkan pengkondisian bersama antara interaksi para pelaku jaringan dan aturan resmi, norma dan prosedur yang dikembangkan dalam rangkaian tindakan. Teori institusional sangat diperlukan untuk memahami fungsi dan pengembangan jaringan pemerintahan karena membantu kita untuk memahami interaksi kompleks antara lembaga politik dan struktur yang muncul dari interaksi mereka.

Institusionalisme lama berfokus pada lembaga-lembaga politik formal dan konstitusional yang didefinisikan dalam istilah parlemen, pemerintah, dan sistem hukum,⁹ institusionalisme baru memiliki fokus kelembagaan yang jauh lebih luas yang mencakup tidak hanya lembaga-lembaga politik formal, tetapi juga institusionalisasi yang kurang formal dari pola-pola interaksi di antara para aktor politik yang berbeda.¹⁰ Institusionalisme baru mengklaim bahwa dalam dunia politik “institusi

⁹Eva Sorensen & Jacob Torfing, *Theories of Democratic Network Governance* (Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2008).

¹⁰Eva Sorensen & Jacob Torfing, 2008.

adalah penting” dan ia mulai mengeksplorasi interaksi politik dan lembaga melalui studi kasus yang secara teoritis diberitahu tentang asal usul, dampak dan transformasi lembaga formal dan informal.

Institusionalisme baru menganggap lembaga sebagai fitur struktural dari sistem sosial yang memberikan tingkat tertentu keteraturan dan stabilitas interaksi sosial dengan cara mengatur dan mempengaruhi keyakinan dan perilaku para aktor. Konsepsi umum tentang peran institusi ini menyembunyikan sejumlah pendekatan teoritis yang bersaing yang cenderung tidak setuju tentang sifat institusi, bagaimana mereka mempengaruhi perilaku manusia dan bagaimana mereka dibangun dan diubah. Meskipun label analitis mungkin berbeda, adalah umum untuk membedakan antara tiga posisi teoritis dalam institusionalisme baru: historis kelembagaan, institusional pilihan rasional dan konstruktivis sosial (atau normatif) institusionalisme.¹¹ Mungkin ada tumpang tindih parsial dan *cross-overs* antara tiga pendekatan institusionalis,¹² tetapi tetap mungkin untuk mengidentifikasi beberapa perbedaan yang jelas dalam asumsi analitis dasar mereka. Pendekatan institusionalis historis berfokus pada mediasi konflik dan klaim bahwa perjuangan politik atas barang langka dapat menghasilkan kompromi politik yang secara kelembagaan dikodifikasi dan cenderung mengatur dan mempengaruhi perjuangan politik di masa

depan yang memunculkan pembangunan yang tergantung pada jalan.¹³

Beberapa konsep dan teori di atas digunakan untuk memahami pelaksanaan Program KB di Kota Makassar. Konsep jaringan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya jejaring dalam proses pemerintahan di Kota Makassar yang membuat sinergitas pelaksanaan program baik Program KB maupun program lainnya. Teori institusional baru menjelaskan interaksi antar aktor dan tidak hanya berfokus pada pemaknaan sederhana. Institusionalisme membahas peran aktor dalam negosiasi yang dilakukan dalam jaringan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian terkait kolaborasi ini adalah metode studi literatur. Metode ini digunakan dengan menjadikan sumber referensi seperti jurnal, buku, laporan pemerintah yang menyangkut topik tersebut menjadi bahan utama penelitian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program KB di Kota Makassar

Program KB merupakan upaya pengurangan penduduk di Indonesia. Pelaksanaan Program KB dari tahun ke tahun terus dilaksanakan oleh pemerintah. Keberlangsungan Program KB menjadi salah satu

¹¹Eva Sorensen & Jacob Torfing, 2008.

¹²Eva Sorensen & Jacob Torfing, 2008.

¹³Eva Sorensen & Jacob Torfing, 2008.

program unggulan pemerintah yang menggunakan anggaran yang cukup besar. Pelaksanaan Program KB di Makassar menjadi perhatian menarik dalam upaya penanganan angka kelahiran. Dalam temuan beberapa riset yang terkait dengan Program KB di Kota Makassar terdapat beberapa persoalan yang menghambat terlaksananya Program KB seperti alat kontrasepsi yang sulit untuk diakses peserta KB maupun sosialisasi serta keikutsertaan masyarakat dalam Program KB di beberapa wilayah di Makassar tidak merata. Hal lainnya yang juga menghambat pencapaian Program KB yakni adanya tumpang tindih Program KB yang dilaksanakan beberapa dinas yang berada dalam naungan Pemerintah Kota Makassar.

Faktor lainnya yang menghambat Program KB adalah capaian yang menjadi tujuan dari Program KB di masing-masing dinas yang berbeda membuat realisasi di Kota Makassar menjadi bias. Beberapa dinas yang memiliki perencanaan program yang berkaitan dengan Program KB melaksanakannya berdasarkan kepentingan masing-masing dinas. Adanya egosentris antar masing-masing dinas, sehingga upaya berkolaborasi dalam pelaksanaan Program KB menjadi sulit.

Faktor pelaksanaan program juga merupakan salah satu masalah. Beberapa perubahan dalam institusi pemerintahan seperti nomenklatur yang berubah menjadikan perombakan struktur dalam sistem. Pada akhirnya menyebabkan terjadinya penyusunan struktur pemerintahan yang mengelola Program KB menjadi rumit.

Efek dari perubahan struktur juga menjadi masalah, di mana Program KB menjadi tidak terkonsentrasi secara baik dalam satu dinas atau badan yang ada di pemerintah Kota Makassar.

Kolaborasi yang diharapkan dalam Program KB sulit terjadi disebabkan karena beberapa hal seperti program yang telah direncanakan oleh masing-masing dinas, mekanisme pelaksanaan program yang berbeda-beda, dan anggaran yang dikurangkan oleh masing-masing dinas berbeda-beda. Ada beberapa dinas yang memiliki konsentrasi dalam Pelaksanaan Program KB, antara lain; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan BKKBN Kota Makassar. Ketiga dinas ini memiliki hubungan erat dengan Program KB Kota Makassar.

Faktor lingkungan yang menjadi penghambat pelaksanaan Program KB adalah keluarga seperti suami yang tidak mendukung penggunaan alat kontrasepsi terhadap istri mereka. Banyaknya pria yang tidak mendukung penggunaan kontrasepsi ini memiliki beberapa alasan seperti kesehatan, pemahaman dan tingkat ekonomi yang membuat mereka sulit untuk mengakses alat kontrasepsi. Hal ini menyebabkan target dari Program KB tidak berjalan dengan signifikan.

Faktor lainnya yakni sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing dinas yang terbatas ditambah dengan terpisahnya masing-masing dinas dalam mejalan-

kan program yang terkait dengan keluarga berencana semakin membuat pencapaian dari target program ini sulit terpenuhi secara baik. Hal lain juga yang menyebabkan Program KB di Kota Makassar kurang begitu maksimal dilaksanakan karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut. Total seluruh pegawai di dinas PPKB Kota Makassar pada tahun 2017 berjumlah 209 orang. Hal lain yang menghambat Program KB terlaksana pada tahun 2020 hingga 2021 adalah kemunculan pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan kesehatan khusus masalah Program KB tidak maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Pelaksanaan Program KB saat ini membutuhkan kerjasama lintas sektor untuk menuntaskan program tersebut. Keberhasilan dari pelaksanaan Program KB tidak hanya berpatokan kepada kinerja bidang yang saling terkait dalam mengurus program, faktor lainnya yang menjadi pendukung keberhasilan program ini bergantung kepada partisipasi dari seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Kota Makassar. Kolaborasi antar dinas di Pemerintah Kota Makassar yang minim menyebabkan efektivitas dari Program KB berjalan dengan apa adanya. Program KB yang harapannya dapat mengatur tingkat kelahiran dan kepadatan penduduk justru tidak berjalan secara penuh.

Pelaksanaan program yang lebih mengedepankan proses sosialisasi tentang pentingnya melakukan KB, mendorong

masyarakat menggunakan alat kontrasepsi dan mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini menjadi kurang maksimal karena fakta yang terjadi pasca ketiga program tersebut dilaksanakan banyak dari masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak melaksanakan upaya penggunaan kontrasepsi. Minimnya alat kontrasepsi yang mudah diakses oleh masyarakat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Program KB. Hal lain yang juga menjadi faktor program tidak berjalan dengan baik adalah lingkungan serta SDM dari para penyuluh keluarga berencana lapangan.

Hal ini disebabkan karena faktor sistem kesehatan kelebihan beban di mana keterbatasan SDM penyedia kesehatan menjadi masalah utama Pemerintah Pusat dan Daerah kembali perlu menganalisis kebijakan-kebijakan yang sifatnya berkaitan dengan persoalan pertambahan angka kelahiran yang berujung pada pertambahan penduduk. Program utama seperti pelaksanaan keluarga berencana di tingkat pemerintah daerah perlu dibenahi dalam upaya untuk membuat kebijakan tersebut maksimal. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam membenahi masalah tersebut adalah Pemerintah Kota Makassar perlu mengsinergikan beberapa program-program lainnya seperti program lorong KB yang dicetuskan dengan menargetkan 178 lorong yang ada di kota Makassar untuk sosialisasi dan partisipasi terkait Program KB dengan program kesehatan yang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Kolaborasi dalam pelaksanaan Program KB di Kota Makassar adalah masalah yang perlu ditangani secara baik dan sinergis. Program KB adalah program yang bisa diselesaikan dengan adanya kerjasama lintas sektor Pemerintahan Kota Makassar. Beberapa masalah seperti tumpang tindih program yang direncanakan dalam pelaksanaannya mestinya dapat dikurangi bahkan dihilangkan seperti penyusunan program yang hampir sama hingga tahap pelaksanaannya. Hal lain juga dalam kolaborasi lintas sektor ini adalah Pemerintah Kota Makassar membangun integrasi lintas sektor ini dengan tetap memperhatikan target kinerja utama di masing-masing dinas atau badan. Dengan sinergitas yang dilakukan dapat juga membuat kekurangan SDM yang ada di masing-masing dinas atau badan mampu diatasi dan mampu bekerjasama untuk melihat masalah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Cudai Nur & Risma Niswaty, "Kepedulian Masyarakat Terhadap Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Makassar", *Prosiding Edisi 2: Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2021* (2021), h. 124–131.

David A. Whetten & Howard Aldrich, "Organization Setsize and Diversity: People-Processing Organizations and Their Environments", *Administration*

& *Society*, Vol. 11, No. 3 (1979), h. 251–281.

Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", *INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 13, No. 4 (2021), h. 13–18.

Eva Sorensen & Jacob Torfing, *Theories of Democratic Network Governance* (Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2008).

Fitri, "Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar", *Skripsi* (Samata: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Henry Mintzberg, "An Emerging Strategy of 'Direct' Research", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24, No. 4 (1979), h. 582–589.

Tuti Marjan Fuadi dan Irdalisa, "Covid 19: Antara Angka Kematian dan Angka Kelahiran," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, Vol. 1, No. 3 (2020), h. 199–211.

Walter J.M. Kickert, Erik-Hans Klijn & Joop F.M. Koppenjan, *Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector* (London: SAGE Publications Ltd, 1997).

Website

BPS Sulawesi Selatan, "Jumlah Penduduk (Jiwa) 2020-2022" dalam <https://sulsel.bps.go.id/indikator/12/83/2/jumlah-penduduk.html> diakses 25 Mei 2022.